

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian merupakan suatu kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup baik dari tanaman pangan maupun tanaman hortikultura yang ada. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam, perkembangan pertanian tidak akan maju tanpa adanya pembangunan ekonomi pertanian itu sendiri.

Pembangunan, yang ekonomi pertanian merupakan suatu upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani dicapai melalui perkembangan teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis dapat menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan perekonomian petani.

Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak pakar ekonomi berkesimpulan bahwa kecenderungan kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan kelembagaan. Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku dan adat istiadat (Djogo, dkk, 2003).

Djogo dkk (2003) juga menyebutkan bahwa pada umumnya definisi lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang. Dalam konteks ini sangat penting diperhatikan bahwa perilaku sosial tidak membatasi lembaga pada peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau organisasi untuk harus berpikir positif ke arah norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka tetapi juga pemahaman akan lembaga ini memusatkan perhatian pada pengertian mengapa orang berperilaku atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan yang ada.

Kelembagaan juga dapat di artikan sebagai hal yang strategis atau hal yang dapat memudahkan bagi petani untuk memenuhi kebutuhan dalam mengelola pertaniannya, ketergantungan antar manusia, yaitu manusia satu sama lain saling membutuhkan. Sumberdaya alam, manusia, modal dan teknologi merupakan syarat keharusan, tetapi tidak memenuhi syarat kecukupan dari upaya pembangunan. Tersedianya perangkat kelembagaan merupakan syarat kecukupan, karena dengan adanya perangkat ini sumberdaya dapat termanfaatkan dengan baik.

Keberadaan kelembagaan pendukung akan memudahkan para petani untuk kelanjutan agribisnis pertaniannya dan juga memudahkan pemerintah untuk kepentingan yang lain dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan kepada petani secara individu. Pentingnya kelembagaan pendukung agribisnis telah diakui dalam pembangunan pertanian, beberapa hasil penelitian di negara-negara maju maupun negara sedang berkembang seperti Indonesia menyatakan bahwa peran

kelembagaan pada setiap subsistem agribisnis belum memperlihatkan kinerja yang saling menguatkan, terdapat kecenderungan tiap lembaga pada subsistem agribisnis berjalan sendiri-sendiri dan tidak mengaitkan pekerjaan atau target kerjanya dengan unit lainnya, sehingga keberadaan kelembagaan diharapkan mampu membantu petani dan hal-hal berkaitan lainnya keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi.

Lembaga-lembaga pendukung sangat berperan dalam keberhasilan suatu pertanian, terutama pada lembaga keuangan seperti perbankan, lembaga pembiayaan dan koperasi yang dapat memberikan permodalan untuk keberlanjutan suatu kegiatan agribisnis terutama pada agribisnis tanaman hortikultura.

Hortikultura merupakan suatu kegiatan pembudidayaan tanaman perkebunan atau pekarangan yang terdiri dari beberapa jenis tanaman mulai dari tanaman sayur, tanaman buah, tanaman bunga dan tanaman obat-obatan. Jenis tanaman tersebut merupakan jenis tanaman yang dapat dibudidayakan mulai dari proses pembibitan, kultur jaringan, panen, pengemasan, dan distribusi.

Pengembangan usaha agribisnis hortikultura mempunyai keunggulan dibandingkan dengan komoditas pertanian lainnya. Pertama dalam satuan luas lahan yang kecil dapat memberikan keuntungan besar. Kedua, dapat memberikan jaminan pendapatan yang tinggi, jangka panjang dan berkelanjutan, seperti pada pengusaha tanaman buah-buahan, maupun tanaman sayuran. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan produk hortikultura, diperlukan usaha peningkatan produksi yang mengarah kepada peningkatan efisiensi usaha atau produktivitas,

mutu produk, keanekaragaman produk dan kontinuitas. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan penguasaan dan aplikasi ilmu dan teknologi, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan optimal, pelaksanaan kegiatan dalam skala usaha yang layak, peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia dalam manajemen usaha, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan swasta dalam melaksanakan agribisnis hortikultura. (Deptan, 2007).

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang sangat berpotensi untuk mengembangkan kegiatan agribisnis tanaman hortikultura karena termasuk daerah tropis dan juga sub tropis karena terletak diantara laut dan pegunungan yang memang berpotensi untuk beberapa jenis komoditi pertaniannya terutama komoditi hortikultura, yang memiliki iklim mulai dari daerah panas, daerah sedang dan daerah sejuk, Kabupaten Bantaeng termasuk kabupaten yang fokus untuk mengembangkan tanaman hortikultura sebagai produk unggulan. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai kegiatan program pengembangan produk pertanian demi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng yang secara teknis melalui Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Bantaeng juga dikenal dengan beranekaragam budidaya pertaniannya yang dilengkapi oleh beberapa lembaga/ unit kerja pembantu atau sarana penunjang pertanian seperti lembaga-lembaga pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai level daerah yang mempunyai wewenang atas regulasi dalam menciptakan lingkungan agribisnis.

Daerah penghasil produk pertanian yang ada di Kabupaten Bantaeng salah satunya di daerah yang termasuk daerah sedang dan sejuk yaitu di Desa Bontomarannu Kecamatan Uluere yang lebih fokus ke tanaman hortikultura seperti kentang, kubis, dan wortel yang sangat dominan dibudidayakan oleh petani karena di daerah tersebut termasuk daerah di atas ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut, yang dominan masyarakat petaninya sudah bercocok tanam pada tanaman hortikultura, akan tetapi produksi hasil pertanian yang dihasilkan para petani hortikultura masih tergolong rendah.

Rendahnya produktivitas tanaman hortikultura disebabkan karena masih minimnya penerapan metode bercocok tanam, tingginya biaya produksi, kurangnya penyediaan bibit unggul, pemeliharaan tanaman yang kurang memadai, dan kurangnya pembinaan dalam usahatani. Petani hortikultura terkhusus pada komoditi kentang, kubis, dan wortel pengetahuannya masih sangat minim mengenai sistem pemasaran karena masih sangat fokus terhadap produksi usahatannya, oleh karena itu sangat diperlukan berbagai dukungan dari lembaga-lembaga penunjang.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat diangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Lembaga penunjang apa saja yang ada untuk agribisnis tanaman hortikultura di Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng ?

2. Bagaimana peran dan fungsi lembaga penunjang terhadap agribisnis tanaman hortikultura di Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi lembaga penunjang yang ada di Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng untuk keberhasilan agribisnis tanaman hortikultura.
2. Untuk mengetahui peran dan fungsi lembaga penunjang terhadap agribisnis tanaman hortikultura di Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian yaitu antara lain :

1. Bagi lembaga-lembaga yang terkait diharapkan benar-benar dapat menjadi penunjang untuk keberhasilan agribisnis hortikultur.
2. Sebagai sumber informasi kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi lembaga penunjang terhadap agribisnis tanaman hortikultura.
3. Memberikan kontribusi positif dan dapat menunjang bagi pengembangan ilmu pengetahuan terhadap petani tanaman hortikultura .

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Subsistem Agribisnis

Agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem, dari mulai pengadaan sarana-sarana produksi, usahatani, usaha pemasaran dari hasil olahan dan lembaga penunjang. Jenis usaha dalam bidang agribisnis juga sangat beragam dan ukurannya juga bervariasi. Dari kondisi ini mengakibatkan banyak lembaga yang terlibat untuk menanganinya. Dukungan kelembagaan agribisnis ini sangat dibutuhkan dan kemajuan agribisnis sangat dipengaruhi oleh peran serta lembaga penunjang (Saragih, 1998).

Subsistem agribisnis merupakan kegiatan yang mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian secara simultan (dalam arti luas) dengan pembangunan industri dan jasa terkait dalam suatu kluster industri (industrial cluster) yang mencakup empat subsistem. Saragih (1998) mengemukakan bahwa sistem agribisnis terdiri atas empat subsistem, yaitu: (a) subsistem agribisnis hulu atau downstream agribusiness, yaitu kegiatan ekonomi (usahatani) yang menghasilkan sarana produksi seperti benih, bibit, pupuk, mesin pertanian, dan industri obat-obatan (pestisida) (b) subsistem agribisnis usahatani atau on-farm agribusiness, yaitu kegiatan pasca panen (produksi); (c) subsistem agribisnis hilir atau upstream agribusiness, yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah dan memperdagangkan hasil usahatani. Ke dalam subsistem ini termasuk industri pengolahan hasil pertanian, home industri berbasis produk pertanian; dan (d) subsistem penunjang atau jasa layanan pendukung agribisnis atau supporting

institution, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa bagi penunjang agribisnis seperti perbankan, asuransi, koperasi, transportasi, penyuluhan, lembaga pemasaran, pemerintah pusat sampai daerah beserta kebijakannya.

Subsistem agribisnis terbagi atas empat yaitu :

2.1.1. Subsistem Lembaga Hulu

Kegiatan subsistem hulu memiliki peranan penting dalam pengembangan sistem agribisnis terutama pada kegiatan pengadaan sarana produksi(alat) dan bahan, oleh karena itu dalam industri hortikultura sangat dibutuhkan dukungan kelembagaan sarana produksi. Kelembagaan ini merupakan kelembagaan ekonomi yang bergerak dibidang penyediaan dan penyaluran sarana (alat) dan bahan produksi. Kelembagaan ini bisa berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan usaha perdagangan swasta, distributor/penyalur sarana produksi, koperasi, usaha sewa menyewa alat alat pertanian baik itu yang dikelola secara individu maupun berbadan usaha, asosiasi dan lain-lainnya (Wahyuningsi, 2004).

2.1.2. Subsistem Lembaga Usahatani (Produksi)

Kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana pasca panen (produksi) yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer. Termasuk kedalam subsistem usahatani ini adalah usaha tanaman pangan, usaha tanaman hortikultura, usaha tanaman obat-obatan, usaha perkebunan, usaha perikanan, usaha peternakan, dan kehutanan. Kelembagaan agribisnis yang mendukung dan terlibat di bidang usaha tani/produksi meliputi: 1) Rumah tangga

petani sebagai unit usaha terkecil. Rumah tangga petani sebagai unit usaha tani yang bergerak dalam budi daya, 2) kelembagaan petani dalam bentuk kelompok tani yang berjumlah 10–20 anggota perkelompok tani, kelembagaan tani dalam bentuk kelompok tani, dan bergabung dalam bentuk yang lebih besar yakni gapoktan kelompok tani yang telah ada berkembang bukan hanya sebagai wadah pembelajaran kegiatan usahatani telah berkembang dengan terbentuknya koperasi sebagai unit bisnis (Wahyuningsi, 2004).

2.1.3. Subsistem Lembaga Pemasaran Hasil Olahan (Hilir)

Subsistem agribisnis hilir, berupa kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir, beserta kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Kegiatan ekonomi yang termasuk dalam subsistem agribisnis hilir ini antara lain adalah industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri pengemasan, industri pengolahan serat (kayu, kulit, karet, sutera, jerami), industri jasa boga, industri farmasi dan bahan kecantikan, dan lain-lain beserta kegiatan dalam rantai pasok (pengumpul, pergudangan, distributor/supplier hasil pertanian, retailer) yang menjamin tersedianya produk pertanian bagi konsumen akhir (Wahyuningsi, 2004).

2.1.4. Subsistem Lembaga Penunjang

Subsistem lembaga penunjang (*off-farm*) yaitu seluruh kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis, seperti lembaga keuangan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga transportasi, lembaga pendidikan dan lembaga

pemerintah (kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan internasional, kebijakan tata-ruang, serta kebijakan lainnya). Subsistem agribisnis lembaga penunjang (supporting institution) merupakan subsistem yang sangat berperan terhadap ketiga subsistem agribisnis lainnya. Subsistem ini akan memberikan dukungan secara kelembagaan dalam pengembangan sistem agribisnis secara keseluruhan. Ada beberapa lembaga yang berperan di dalam sub sistem lembaga penunjang untuk pengembangan sistem agribisnis berbasis lingkungan seperti perbankan, asuransi, koperasi, transportasi, penyuluhan, kebijakan pemerintah, lembaga pendidikan dan penelitian, dan lain-lainnya yang secara tidak langsung mendukung proses produksi dan penyaluran hasil pertanian (Wahyuningsi, 2004).

Subsistem jasa layanan pendukung atau kelembagaan penunjang agribisnis merupakan semua jenis kegiatan yang berfungsi mendukung dan melayani serta mengembangkan kegiatan subsistem yang lain. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan ini adalah keuangan, SDM, dan lembaga-lembaga pengambil kebijakan (Saragih, 1998).

Sebagai suatu sistem, dapat terlihat dengan jelas bahwa subsistem-subsistem agribisnis saling berkaitan, subsistem agribisnis hulu membutuhkan umpan balik dari subsistem usahatani agar dapat memproduksi sarana produksi yang sesuai dengan kebutuhan budidaya pertanian. Sebaliknya, keberhasilan pelaksanaan operasi subsistem usahatani bergantung pada sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hilir. Selanjutnya, proses produksi agribisnis hilir bergantung pada pasokan komoditas primer yang dihasilkan oleh subsistem

usahatani. Subsistem jasa layanan pendukung keberadaannya tergantung pada keberhasilan ketiga subsistem lainnya. Jika subsistem usahatani mengalami kegagalan, sementara sebagian modalnya merupakan pinjaman maka lembaga keuangan dan asuransi juga mengalami kerugian (Saragih, 1998).

2.2. Kelembagaan Pertanian

Kelembagaan pembangunan pertanian yang dilakukan selama ini lebih mementingkan pembangunan fisik dari pada pengembangan kelembagaan petani. Hal ini pembangunan fisik jauh lebih mudah dibandingkan dengan pengembangan kelembagaan (Syahyuti, 2007).

Secara empiris kelembagaan pertanian dapat dibedakan antara lain: (1) kelembagaan sosial nonbisnis yang merupakan lembaga pertanian yang mendukung penciptaan teknologi, penyampaian teknologi, penggunaan teknologi dan pengarahannya partisipasi masyarakat seperti lembaga penelitian, penyuluhan, kelompok tani, dan sebagainya. (2) lembaga bisnis penunjang yang merupakan lembaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan, seperti operasi, usaha perorangan, usaha jasa keuangan dan sebagainya (Hermanto, 2006).

Selama ini kelembagaan perekonomian pedesaan dinilai oleh banyak ahli sangat rapuh dan di pandang sebagai penyebab kegagalan pengembangan perekonomian di pedesaan. Kerapuhan tersebut di tunjukkan oleh tidak efektifnya oleh pemberdayaan faktor kepemimpinan (sebagai penggerak kemajuan) di pedesaan, struktur dan keorganisasian ekonomi pedesaan yang dibiarkan rapuh, ekonomi yang tidak mengangkat kedaulatan (politik) masyarakat pedesaan dalam

kegiatan ekonomi serta di biarkan faktor kompetisi sumber daya manusia pedesaan terbengkalai (Dimiyanti, A.,2007).

Membangun dan mengembangkan sektor pertanian atau pedesaan di Indonesia tidak dapat dipungkiri dibutuhkan kelembagaan lokal maupun kelembagaan pembangunan, hal ini dapat dilihat dari sejarah revolusi hijau di Indonesia, pembangunan pertanian khususnya pengembangan tanaman pangan, pada tingkat makro nasional peran kelembagaan pertanian sangat menonjol dalam peningkatan produksi tanaman pangan, pemerintah membentuk kelembagaan untuk mendukung kegiatan pedesaan dalam pencapaian tujuan pembangunan diantaranya Demonstrasi Massal (Demas), Bimbingan Massal (Bimas), Bimas Gotong Royong, Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Koperasi Unit Desa (KUD), Insus dan supra Insus. kegiatan pedesaan dalam pencapaian tujuan pembangunan diantaranya Demonstrasi Massal (Demas), Bimbingan Massal (Bimas), Bimas Gotong Royong, Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Koperasi Unit Desa (KUD), Insus dan supra Insus (Dimiyanti, A.,2007).

Peranan agribisnis pertanian dalam perekonomian Indonesia sangat penting, dan bahkan derajat kepentingannya diduga akan semakin meningkat, terutama setelah sektor industri pertambangan dan minyak bumi mengalami penurunan produksi yang sangat mengkhawatirkan. Penggerakan sektor agribisnis memerlukan kerjasama berbagai pihak terkait, yakni pemerintah, swasta, petani, maupun perbankan, agar sektor ini mampu memberikan sumbangan terhadap devisa negara. Kebijakan dalam hal peningkatan investasi harus didukung oleh

penciptaan iklim investasi Indonesia yang kondusif, termasuk juga dalam birokrasi, akses kredit, serta peninjauan peraturan perpajakan dan tariff pajak untuk sektor agribisnis (Gumbira. et al, 2005).

2.3. Lembaga Penunjang Agribisnis Hortikultura

Berikut definisi lembaga menurut beberapa ahli :

1. Menurut Macmillan (dalam Saharuddin, 2001) bahwa lembaga merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai nyata yang terpusat pada kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.
2. Menurut Hendropuspito bahwa lembaga sebagai bentuk lain organisasi yang tersusun secara tetap dari pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi sebagai cara mengikat guna tercapainya kebutuhan sosial dasar.

Lembaga-Lembaga Penunjang Agribisnis Hortikultura antara lain :

(1) Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan yang termasuk dalam lembaga penunjang agribisnis yaitu permodalan, lembaga pembiayaan dan koperasi. Lembaga keuangan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan pertanian.

Koperasi merupakan salah satu lembaga yang juga perlu mendapat perhatian dalam upaya pengembangan sistem agribisnis terutama di daerah pedesaan kecil, mengingat petani sebagai pelaku mayoritas dan utama dalam sistem ini memiliki kemampuan yang lemah dalam hal permodalan, akses informasi, dan aplikasi teknologi (Yusdja et al. 2002). Koperasi dapat menjadi

media bagi petani untuk secara bersama-sama membangun usahanya secara terintegrasi dari subsistem hulu sampai subsistem hilir, agar petani dapat memperoleh nilai tambah yang lebih baik. Saat ini, koperasi yang bergerak di bidang pengadaan sarana produksi telah ada dan terus bertambah namun belum mampu bekerja secara maksimal.

Khusus aspek permodalan, pihak perbankan masih menganggap bahwa usaha kegiatan agribisnis sebagai usaha yang belum mendapatkan prioritas untuk mendapatkan bantuan kredit usaha. Hal ini dikarenakan, pihak perbankan masih menganggap bahwa agribisnis beresiko tinggi (*high risk*) dan rendah dalam hal pendapatan (*low return*) (Karim 2002). Dalam rangka pengembangan sistem agribisnis maka prasarana jalan merupakan faktor yang menentukan tingkat aksesibilitas dalam suatu kawasan. Aksesibilitas kawasan akan mempengaruhi kinerja sosial dan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, tingginya sumbangan terhadap perekonomian wilayah dari suatu daerah akan mendorong pemerintah untuk membangun infrastruktur jalan menuju kawasan agribisnis. Prasarana jalan merupakan prasarana vital untuk mengembangkan perekonomian khususnya di daerah pedesaan. Terbangunnya jalan kabupaten (antar kecamatan) dan antar desa akan memudahkan pengangkutan hasil pertanian dan peternakan berupa barang produksi dan konsumsi. Prasarana jalan merupakan kebutuhan prioritas dalam pengembangan agribisnis di wilayah pedesaan.

(2) Lembaga Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Hasibuan (2000) sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi

atau kelembagaan, baik institusi maupun perusahaan. SDM (Sumber Daya Manusia) juga merupakan kunci yang menentukan berkembang atau tidaknya suatu perusahaan ataupun kelembagaan. Pada hakikatnya SDM berupa manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan dan target kerja. Lembaga sumber daya manusia mencakup beberapa kelembagaan sebagai berikut :

- Lembaga pendidikan

Lembaga pendidikan merupakan lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau proses belajar mengajar yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi lingkungan sekitarnya, lembaga pendidikan terbagi atas tiga yaitu lembaga formal, lembaga nonformal dan lembaga informal. Lembaga pendidikan yang biasa diterapkan dikalangan petani atau masyarakat yaitu lembaga nonformal. Pendidikan yang nonformal diselenggarakan untuk kepentingan warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan.

- Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Lembaga penelitian dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan, dan juga memfasilitasi adanya penjaminan mutu untuk lembaga penelitian dan pengembangan.

(3) Lembaga Pengambil Kebijakan (Pemerintah)

Pemerintah memiliki dua kebijakan ekonomi, yaitu:

- Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal merupakan suatu kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah dan mengatur pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar, namun kebijakan fiskal lebih akan menekankan pada pengaturan pendapatan (pajak dan lain-lain) dan belanja/penganggaran rumah tangga pemerintahan.

Dengan menaikkan atau menurunkan anggaran pendapatan dan belanja tahunan pemerintah (APBN), pemerintah dapat mengubah atau mempengaruhi situasi dan kondisi perekonomian ke arah yang diinginkan sesuai dengan rencana dan target jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

- Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter merupakan usaha dalam mengendalikan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan *output* keseimbangan. Pengaturan jumlah uang yang beredar dimasyarakat diatur dengan cara menambah jumlah uang yang beredar untuk menambah minat belanja masyarakat atau berusaha untuk menarik uang yang beredar dengan memberi

insentif atas investasi ataupun tabungan perbankan guna menekan minat belanja masyarakat. Kebijakan moneter digolongkan menjadi dua yaitu :

- a) Menambah jumlah uang beredar : moneter ekspansif
- b) Mengurangi jumlah uang beredar : moneter kontraktif

2.4. Faktor Yang Mempengaruhi Lembaga Penunjang Agribisnis Hortikultura

Faktor yang mempengaruhi lembaga penunjang yaitu faktor ekologi yang secara etimologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua akar kata yakni oikos berarti rumah, rumah tangga, logos berarti ilmu atau teori mempelajari tentang selat beluk rumah tangga alam dan biasanya dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ekologi melihat alam sebagai pola jaringan kehidupan yang tersusun dengan energi dan arus materi, dimana semua makhluk hidup terkait didalamnya (Noughton, dkk, 1990).

Sehubungan dengan hal di atas bahwa kita ketahui pada mulanya ekologi ditetapkan terbatas pada hewan dan tumbuh-tumbuhan sehingga dikenal ekologi hewan dan ekologi tumbuh-tumbuhan, tetapi seiring dengan bertambahnya waktu kemudian diterapkan juga oleh dan kepada manusia. Faktor ekologi terbagi atas tiga lingkungan sebagai berikut.

1. Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik merupakan segala sesuatu yang ada disekitar kita yang berbentuk benda mati seperti bangunan (rumah, kantor, dan lain-lain), gunung, air, udara, dan lain-lain semacamnya.

2. Lingkungan Biologi

Lingkungan biologi merupakan segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri yaitu hewan dan tumbuhan.

3. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan manusia-manusia lain yang ada disekitarnya seperti teman dan tetangga-tetangga, baik yang dikenal maupun tidak dikenal.

2.5. Peran dan Fungsi Lembaga Penunjang Agribisnis

Peran kelembagaan agribisnis bagi pembangunan pertanian dan perekonomian di Indonesia adalah alat untuk mengakselerasi modal sosial bagi kebutuhan pembangunan ekonomi pertanian yang berdaya saing, lebih demokratis, berkerakyatan, sehingga lebih mensejahterakan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Selain itu, kelembagaan akan memungkinkan dan memberikan landasan kondusif (*enabling*) bagi berkembangnya kehidupan petani dan pertanian masa depan (Anantanyu 2010).

Peran penting kelembagaan agribisnis dalam sistemnya adalah sebagai penunjang keberlangsungannya sub-sub sistem agribisnis, seperti yang

diketahui system agribisnis terdiri dari empat sub sistem (1) sub sistem hulu atau *up-stream* (2) sub sistem budidaya atau on farm (3) sub sistem hilir atau *down stream* dan yang terakhir adalah (4) lembaga penunjang. Dimana semua sub sistem tersebut saling berkesinambungan dan ketergantungan. Begitu juga dengan lembaga penunjang atau kelembagaan agribisnis yang berperan sebagai penunjang adanya pengadaan, pengelolaan serta pengontrolan kegiatan agribisnis dari hulu hingga hilir.

Tabel. 1. Peran dan Fungsi Lembaga Penunjang terhadap Agribisnis Tanaman Hortikultura

No	Lembaga Penunjang	Peran	Fungsi
1.	Lembaga Keuangan	Berperan penting dalam perekonomian petani dari pengolahan hingga pemasaran.	Berfungsi menyediakan modal termasuk investasi dan modal kerja.
2.	Lembaga SDM (Sumber Daya Manusia)	Berperan besar dalam pengembangan agribisnis pertanian.	Berfungsi sebagai penambah lembaga pendidikan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
3.	Lembaga Pemerintah	Berperan dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan.	Berfungsi sebagai pembuat peraturan dan perundang-undangan, pemerintah bersama lembaga legislatif membuat undang-undang yang akan mengatur, mengkoordinir dan mengawasi semua interaksi pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatannya

Sumber: Lembaga Pendukung dan Sarana Penunjang (Anantanyu. 2010).

2.6. Kerangka Pemikiran

Subsistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat sistem diantaranya adalah subsistem agribisnis hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi seperti bibit, pupuk, mesin atau peralatan pertanian. Kedua yaitu subsistem agribisnis usahatani yang bergerak pada kegiatan pasca panen. Ketiga yaitu subsistem agribisnis hilir yang bergerak pada pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan Keempat yaitu subsistem penunjang atau jasa layanan pendukung yang merupakan penyediaan layanan penunjang untuk agribisnis seperti permodalan, asuransi, penyuluhan, dan kebijakan pemerintah.

Kelembagaan merupakan suatu kelompok yang saling berinteraksi satu sama lain baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang banyak, kelembagaan sangat berpengaruh bagi suatu usaha terutama di bidang pertanian yang memiliki institut yaitu lembaga-lembaga pendukung atau penunjang untuk keberhasilan suatu agribisnis pertanian.

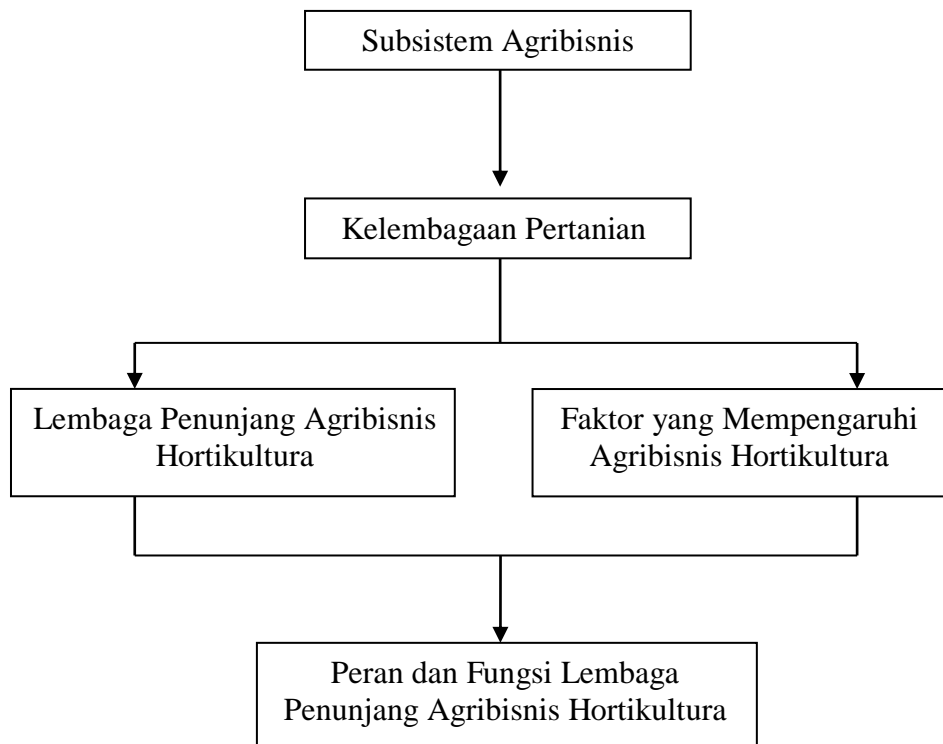
Lembaga penunjang agribisnis yaitu suatu lembaga pendukung keberhasilan pertanian baik dari sektor hulu sampai hilir, salah satu lembaga penunjang yang sangat penting yaitu lembaga sumber daya manusia karena merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu usahatani. Lembaga penunjang terbagi atas lembaga keuangan, lembaga sumber daya alam, dan lembaga pemerintah

Agribisnis hortikultura merupakan suatu kegiatan usaha pemanfaatan hasil pertanian yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu lingkungan fisik yang merupakan segala sesuatu berupa bangunan, lingkungan biologis yaitu sesuatu

berupa organisme hidup dan lingkungan sosial yaitu manusia disekitar.

Hortikultura merupakan jenis tanaman yang terdiri dari tanaman sayur, tanaman buah, tanaman bunga dan tanaman obat-obatan. Tanaman hortikultura biasanya dibudidayakan di sekitar rumah dan perkebunan.

Peran dan fungsi lembaga penunjang agribisnis tanaman hortikultura dapat digambarkan sesuai kerangka pemikiran yang berkaitan diuraikan seperti gambar di bawah.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran Peran dan Fungsi Lembaga Penunjang terhadap Agribisnis Tanaman Hortikultura di Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng sebagai sentra pengembangan tanaman hortikultura di Sulawesi Selatan dan memiliki perangkat kelembagaan yang lengkap. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, yaitu bulan Juni sampai Agustus 2017.

3.2. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dilakukan dengan sengaja atau dengan purposive yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, dan berdasarkan kriteria tertentu dengan mengharapkan suatu persamaan. Adapun yang menjadi kriteria tertentu dalam penelitian ini yaitu : masing-masing ketua dari lembaga-lembaga penunjang terkait yang ada di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng. Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan cara menunjuk langsung informan yang akan di wawancarai dengan jumlah informan 4 orang yang terdiri dari, ketua Kelompok Tani, KUD, BP3K dan ketua Gapoktan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden secara langsung baik melalui wawancara, kuisioner ataupun melakukan pengamatan langsung kelapangan terhadap lembaga penunjang yang terkait terhadap agribisnis tanaman hortikultura.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, artikel, foto, buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan :

1. Observasi, merupakan pengamatan setiap kegiatan untuk melaksanakan pengukuran secara langsung di lapangan.
2. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang dibuat dalam suatu daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak-pihak yang berhubungan atau terkait langsung dengan masalah yang akan diteliti.
3. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan melalui pengambilan gambar yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam, data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam tahap pengumpulan data perlu diolah terlebih dahulu, tujuannya adalah menyederhanakan seluruh data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, yang kemudian menyajikannya dalam susunan yang baik sehingga kemudian mudah untuk menganalisisnya.

3.6. Definisi Operasional

1. Agribisnis merupakan suatu usaha yang bergelut di bidang pertanian dan suatu usaha berbasis pertanian mulai dari penyediaan sarana produksi sampai pengelolaan, agribisnis mengacu pada suatu usaha untuk menekan kerugian dan memperoleh keuntungan dan juga memegang peranan penting dalam perekonomian.
2. Subsistem agribisnis merupakan suatu sistem yang sangat berperan penting dalam suatu usahatani mulai dari penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil pertanian, pemasaran dan lembaga pendukung untuk keberhasilan agribisnis.
3. Lembaga penunjang merupakan sarana penunjang dalam agribisnis dan semua kegiatan yang berfungsi mendukung dan melayani serta mengembangkan kegiatan dari subsistem agribisnis yang lain.
4. Hortikultura merupakan jenis tanaman yang lebih memfokuskan pada pembudidayaan tanaman buah, sayur, bunga dan tanaman obat-obatan.
5. Peran merupakan suatu kegiatan atau tingkah laku yang dilakukan untuk dapat memenuhi suatu tujuan.
6. Fungsi dapat diartikan sebagai suatu kegunaan atau manfaat yang muncul dari apa yang telah dilaksanakan sebelumnya.

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Letak Geografis dan Topografi

Desa Bonto Marannu adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng dan menjadi ibu kota kecamatan, yang berada di bagian utara Kabupaten Bantaeng dengan jarak 20 km. luas wilayah 1248 Ha atau 1. 25 Km², Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Bonto Lojong
- Sebelah Timur : Desa Bonto Tangnga
- Sebelah Selatan : Desa Bonto Daeng
- Sebelah Barat : Kabupaten Jeneponto

Administratif Desa Bonto Marannu terbagi atas tiga dusun yaitu:

1. Dusun Selayar
2. Dusun Loka
3. Dusun Gunung Loka

Setiap dusun dipimpin oleh kepala Dusun yang dibantu oleh ketua RK dan Ketua RT. Sistem pemerintahan yakni, camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan desa pada dasarnya bertanggung jawab pada masyarakat desa. Prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat, Kepala Desa bersama dengan Badan permusyawaratan Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Desa Bonto Marannu memiliki kondisi daerah yang termasuk dalam kategori daratan tinggi (berbukit-bukit), berada diatas gunung dengan ketinggian 1100 meter diatas permukaan laut (Mdpl). Kondisi tanah cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang.

4.2. Iklim dan Curah Hujan

Pada umumnya iklim dan curah hujan di Desa Bonto Marannu hampir sama dengan daerah lainnya yang ada di Kabupaten Bantaeng yakni memiliki iklim sub tropis dan terdapat 2 musim (musim hujan dan musim kemarau). Musim hujan biasanya mulai pada bulan April sampai Juli sedangkan musim kemarau biasanya antara bulan Agustus sampai Februari.

4.3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu syarat bagi terbentuknya suatu negara dan sekaligus sebagai aset atau modal bagi suksesnya pembangunan disegala bidang kehidupan. Oleh karena itu kehadiran dan peranan sangat menentukan bagi perkembangan suatu wilayah, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Untuk mengetahui keadaan penduduk Desa Bonto Marannu dapat dilihat dari segi umur, jenis kelamin, pendidikan dan mata pencaharian.

4.3.1. Penduduk berdasarkan klasifikasi jenis kelamin dan umur

Jumlah penduduk di Desa Bonto Marannu sebanyak 1.453 jiwa dimana Laki-laki berjumlah 691 jiwa dan Perempuan 762 jiwa. Untuk mengetahui jumlah penduduk di Desa Bonto Marannu dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng

Dusun	Jumlah KK	Jumlah KRT	Jumlah Jiwa		Jumlah		%		
			L	P	KK	Jiwa	KK	KRT	Jiwa
Selayar	160	124	239	284	160	523	30,82	28,70	35,99
Loka	266	233	277	292	266	569	51,25	53,93	39,16
G. Loka	95	75	175	186	93	361	17,36	17,36	24,84
Total	519	432	691	762	519	1453	100	100	100

Sumber : Data Desa Bonto Marannu 2016.

Tabel diatas memberikan gambaran bahwa jumlah Kepala Keluarga (KK) Desa Bonto Marannu sebanyak 519 jiwa yang terdiri dari dusun Selayar sebanyak 160 orang atau 30,82% dari jumlah seluruh KK yang ada. Dusun Loka sebanyak 266 jiwa atau 51,25% dari jumlah KK dan dusun Gunung Loka sebanyak 93 jiwa atau 17,91% dari jumlah KK, kemudian jumlah kepala rumah tangga sebanyak 432 orang yang terdiri dusun Selayar sebanyak 124 orang jiwa, dan Dusun Loka sebanyak 233 orang dan dusun Gunung Loka sebanyak 75 orang.

Jumlah penduduk Desa Bonto Marannu sebesar 1453 jiwa yang terdiri dari Dusun Selayar Sebanyak 523 jiwa, Dusun Loka 569 jiwa dan Dusun Gunung Loka 361 jiwa. Selain dari tabel diatas jumlah penduduk Desa Bonto Marannu dapat dilihat berdasarkan Kelompok Usia yang lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Penduduk Berdasarkan kelompok Usia Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng.

No	Umur (Tahun)	Dusun			Jumlah	%
		Selayar	Loka	G. Loka		
1	1-5	42	58	38	139	9,56
2	6-10	48	46	31	125	8,60
3	11-15	61	59	47	167	11,49
4	16-20	55	47	39	141	9,70
5	21-25	56	43	56	155	10,66
6	26-30	43	56	25	124	8,53
7	31-35	38	52	34	124	8,53
8	36-40	40	54	27	121	8,32
9	41-45	42	37	26	105	7,22
10	46-50	25	35	8	68	4,67
11	51-55	33	26	12	71	4,88
12	56-60	9	13	6	28	1,92
13	61-65	12	17	6	35	2,40
14	66-70	8	7	2	17	1,16
15	> 70	10	19	4	33	2,27
Total Keseluruhan		523	569	361	1453	100

Sumber : Data Desa Bonto Marannu 2016.

Tabel 3. menggambarkan bahwa di Desa BontoMarannu berdasarkan kelompok usia jumlah penduduk terbanyak pada usia 11-15 tahun yaitu sebanyak 167 jiwa atau 11,49% dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Bonto Marannu. Kemudian jumlah penduduk yang terendah pada kelompok usia kurang dari 1 tahun hanya sekitar 15 jiwa atau 1,03% dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Bonto Marannu.

4.3.2. Mata Pencaharian

Sumber mata pencaharian penduduk di Desa Bonto Marannu yaitu bertani, tukang (batu dan kayu) , Pedagang, Pegawai negeri sipil, ABRI, dan Jasa. Berikut lebih jelasnya tentang mata pencaharian penduduk Desa Bonto Marannu dapat dilihat pada Tabel 4:

Tabel 4. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Petani	685	47,14
2	Tukang (Batu dan Kayu)	34	2,33
3	Pedagang	274	18,85
4	Pegawai Negeri Sipil	230	15,82
5	ABRI	30	2,06
6	Jasa	200	13,76
Jumlah		1453	100

Sumber : Data Desa Bonto Marannu 2016.

Tabel 4. terlihat bahwa penduduk di Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, mata pencaharian yang dominan adalah Petani sebanyak 685 orang atau 47,14 % dan yang paling rendah yaitu penduduk yang bermata pencaharian sebagai ABRI hanya 30 orang atau 2,06 %.

4.3.3. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pembangunan pendidikan diutamakan pada peningkatan mutu, kapasitas dan perluasan kesempatan belajar di semua jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Upaya peningkatan pendidikan yang ingin dicapai tersebut agar menghasilkan perkembangan dalam hal pengetahuan dan menjadi manusia seutuhnya, sedangkan perluasan kesempatan belajar

bertujuan agar penduduk usia sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan perekonomian daerah.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng pada umumnya banyak yang masih belum mendalami yang namanya jenjang pendidikan di bangku sekolah akan tetapi yang sudah mengenal jenjang pendidikan lebih merata dari tingkat pendidikan rendah sampai tingkat pendidikan tinggi. Hal ini disebabkan karena banyak diantara mereka yang menyadari betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman mereka tentang pendidikan digolongkan sudah cukup tinggi, sehingga dalam penyerapan suatu pengetahuan dan inovasi diharapkan berjalan dengan cepat.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	163	11, 21
2	SD	720	49,55
3	SMP	160	11, 01
4	SMA	147	10,11
5	Perguruan Tinggi	123	8,46
6	Sarjana	140	9,63
Jumlah		1453	100

Sumber : Data Desa Bonto Marannu 2016.

Tabel 5. menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di di Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng dengan persentase

terbesar adalah penduduk yang tamat SD (49,55%), kemudian disusul berturut-turut penduduk dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD (11, 21%), SMP (11, 01%), tamat SMA (10,11%), sarjana (9,63%) dan sementara melanjutkan perguruan tinggi (8,46%).

Kondisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tersebut pada dasarnya masih tergolong rendah, karena umumnya berada pada golongan penduduk tamat SD, namun secara keseluruhan tingkat pendidikan merata mulai dari SD sampai Sarjana, sehingga penyebaran ilmu pengetahuan formal dapat dilakukan melalui proses sosialisasi hubungan bermasyarakat.

4.3.4. Sarana Transportasi Desa Bonto Marannu

1. Sarana Jalan

Di Desa Bonto Marannu saat ini terdapat jalan poros Kabupaten yang terdiri dari satu jalur yang memiliki panjang \pm 3 Km dalam kondisi baik, akan tetapi masih ada jalanan yang tergolong kurang baik atau rusak khususnya jalan lorong.

2. Sarana angkutan

a) Mobil mikrolet

Mikrolet di Desa Bonto Marannu pada dasarnya mengangkut penumpang dari terminal kota Bantaeng sampai di Desa Bonto Marannu dan juga masyarakat luar dari Desa Bonto Marannu akan melewati antara terminal kota Bantaeng dengan Desa Bonto Marannu.

b) Mobil truk

Kendaraan truk di Desa Bonto Marannu kebanyakan digunakan untuk mengangkut material alam untuk pembangunan atau pelaksanaan program pemerintah, dan juga sebagian digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dalam skala besar.

c) Mobil pick up

Di Bonto Marannu juga terdapat kendaraan yang dinamakan mobil pick up yaitu mobil dengan bak terbuka yang biasanya digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dan juga peternakan di dalam daerah maupun ke luar daerah Desa Bonto Marannu

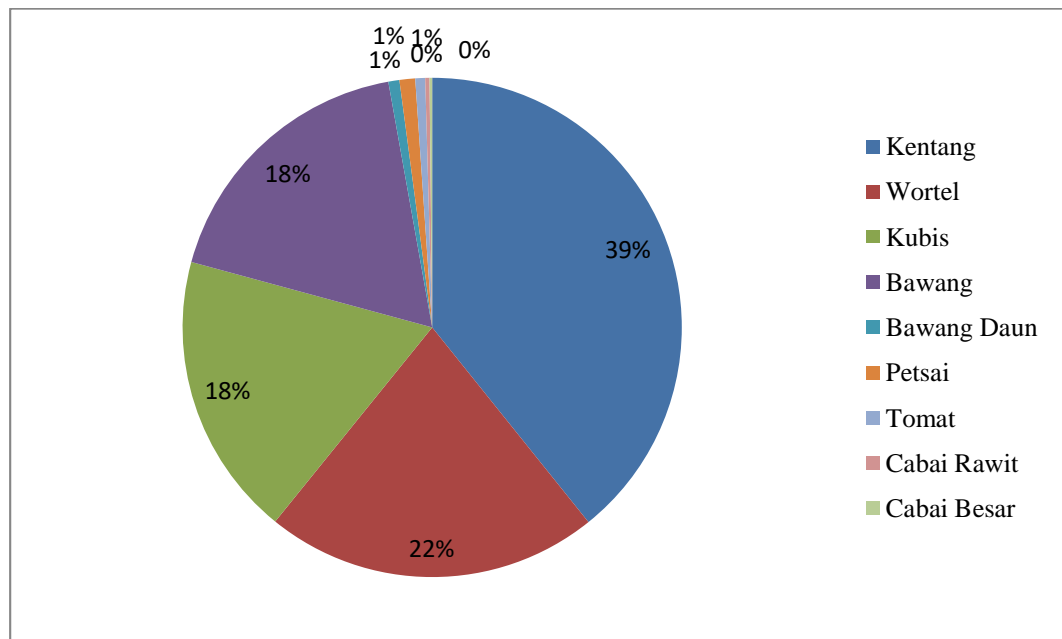
d) Motor

Kendaraan motor dimanfaatkan sebagai ojek yang dijadikan sebagai pekerjaan sampingan bagi masyarakat petani ketika pekerjaan di kebun sudah selesai yaitu dengan mengangkut orang maupun barang.

4.4. Kondisi Pertanian Kecamatan Uluere

Kondisi topografi Kecamatan Uluere adalah lembah, pegunungan dan dataran bergelombang (kemiringan 15-40%) dengan ketinggian 900-1,000 meter dari permukaan laut (mdpl). Dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian utama di bidang pertanian komoditas hortikultura, dan merupakan salah satu daerah pemasok sayuran hortikultura di wilayah Provinsi Sulawesi selatan, khususnya Makassar.

Kecamatan ini merupakan sentra pengembangan kentang dan beberapa komoditi hortikultura lainnya seperti yang disajikan pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Komoditi share Kecamatan Uluere

Sebagai referensi bagi pengumpul ataupun pasar, gambar diatas memberikan informasi mengenai komoditi unggulan dari Kecamatan Uluere Kabupaten Banteng.

Seperti yang diketahui secara umum bahwa bantaeng dikenal dengan produksi kentang, wortel, kubis dan bawangnya yang cukup besar. Dilihat dari karakter dari komoditi yang diunggulkan maka disimpulkan bahwa tanaman berumbi sangat cocok didaerah ini. Selain dari luasan yang dimilikinya, kondisi lahan juga sangat mendukung untuk komoditi ber umbi tersebut.

4.4.1. Kualitas Pelaksana Pertanian Desa Bonto Marannu

Dengan berhasilnya Kecamatan Uluere, khususnya Desa Bonto Marannu menjadi salah satu daerah produksi hortikultura di Provinsi Sulawesi Selatan,

tentunya petani di Desa Bonto Marannu telah mendapatkan berbagai pelatihan teknis baik yang diadakan oleh pemerintah maupun oleh lembaga formal.

Untuk mengetahui kemampuan masyarakat tani terhadap metode budidaya dan berbisnis hortikultura, peneliti mengadakan wawancara dengan beberapa petani secara individu dan ikut dalam Focus Group Discussion (FGD) yang difasilitasi oleh Yayasan Ersalindo Alamedika.

Atas informasi yang dihimpun, disimpulkan bahwa selama ini petani lebih banyak mendapatkan solusi atas masalah pertanian yang dihadapi dengan adanya penyuluhan pertanian yang rutin diadakan oleh Bidang Penyuluhan Pertanian, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng.

Selain itu, peningkatan kapasitas petani juga didapatkan secara non-formal yang sering diadakan dalam bentuk diskusi partisipatif dan juga informasi antar sesama petani.

Berikut metode peningkatan kapasitas yang didapatkan oleh petani di Desa Bonto Marannu :

- Penyuluhan Resmi Pertanian
- Pertemuan Kelompok Tani dan LSM
- Penyuluhan dan kunjungan dari Perusahaan Benih, Pupuk dan Pestisida
- Hibauan swadaya melalui penerangan masjid
- Informasi dari pengumpul

Peningkatan kapasitas petani ini juga biasa dilakukan melalui studi banding ke area pertanian diluar Desa Bonto Marannu maupun undangan

pertemuan kelas keluar dari Desa Bonto Marannu yang lebih sering diadakan oleh Pemerintah.

4.4.2. Fasilitas Fisik Pendukung Hortikultura Desa Bonto Marannu

Saat ini di Desa Bonto Marannu telah beroperasi beberapa bangunan pertanian yang berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengkajian hortikultura dari pemerintah Indonesia yang tentunya manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh petani desa setempat melainkan seluruh petani yang ada di Indonesia yang melakukan kunjungan ataupun training ditempat tersebut.

Fasilitas fisik tersebut adalah sebagai berikut :

- Pusat Benih Hortikultura Loka Bantaeng

Fasilitas ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng.

- Laboratorium Kultur Jaringan Loka Desa Bonto Marannu

Fasilitas ini pun dikelola oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Pertanian Hortikultura Desa Bonto Marannu

Hortikultura sebagai tanaman perkebunan sangat dimanfaatkan oleh masyarakat petani sebagai peluang dalam mengembangkan perekonomian daerah. Kegiatan pembudidayaan tanaman hortikultura yang terdiri dari beberapa jenis tanaman mulai dari tanaman sayur, tanaman buah, tanaman bunga dan tanaman obat-obatan mempunyai banyak manfaat bagi tubuh dan lingkungan hidup diantaranya dapat memnuhi kebutuhan jasmani oleh sumber vitamin, energi dan protein yang dihasilkan dari jenis sayur dan buah kemudian juga dapat memberikan keindahan dan kelestarian lingkungan. Jenis tanaman tersebut merupakan jenis tanaman yang dapat dibudidayakan mulai dari proses pembibitan, kultur jaringan, panen, pengemasan dan distribusi.

5.1.1. Peta Wilayah Komoditas Hortikultura

Perkembangan produksi hortikultura, khususnya komoditi utama mengalami peningkatan yang cukup berarti. Bahkan Kabupaten ini punya visi menjadikan sebagai kabupaten agribisnis terkemuka di kawasan timur Indonesia. Misinya mengembangkan jenis tanaman hortikultura yang punya prospek pasar dalam negeri maupun ekspor pada wilayah yang secara teknis sesuai baik agroklimat maupun lahan.

Hortikultura yang paling dominan dibudidayakan petani yaitu hortikultura jenis tanaman *Olerikultura* yang merupakan jenis tanaman sayur seperti sayur

daun dan sayur buah, akan tetapi para petani Desa Bonto Marannu lebih mengutamakan dalam usahatani sayur jenis umbi-umbian seperti kentang, kubis dan wortel karena potensi kerusakan yang dimiliki lebih rendah dibandingkan dengan sayur daun.

Berdasar dari data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantaeng, berikut tersaji data produksi komoditi unggulan perwilayah kecamatan.

Tabel 7. Produktivitas Komoditi Unggulan Per Kecamatan

Kecamatan	Kentang		Wortel		Kubis	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Bisappu	-	-	-	-	-	-
Uluere	786	13,084	614	7,201	431	6,136
Sinoa	14	200	10	154	11	218
Bantaeng	6	90	3	50	2	37
Eremerasa	7	79	3	34	10	155
Tompobulu	5	48	-	-	2	40
Pakjukukang	-	-	-	-	-	-
Gantarangkeke	-	-	-	-	-	-
Total	818	13,501	670	7,440	456	6,586

Sumber : (BPS Kabupaten Bantaeng 2016).

Kecamatan Uluere menjadi kecamatan yang memiliki lahan pertanian dan kapasitas produksi yang paling besar setiap komoditi disemua kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Terdapat enam desa di Kecamatan Uluere yaitu : Desa Bonto Marannu (19,2Km²), Bonto Lojong (19,17Km²), Bonto Daeng (10,47Km²), Bonto Rannu (2,72Km²), Bonto Tallasa (7,04Km²) dan Bonto Tangnga (6.85Km²), terlihat bahwa Desa Bonto Marannu merupakan salah satu desa terluas yang ada di Kecamatan Uluere sehingga dapat disimpulkan bahwa Desa Bonto Marannu termasuk memiliki wilayah hortikultura yang luas.

5.1.2. Potensi Agribisnis Hortikultura

Luas lahan yang mencapai ± 39.583 Ha yang dirincikan sebagai 7,254 Ha (18,32%) merupakan areal persawahan dan 32,330 Ha merupakan lahan kering, tentunya Kabupaten Bantaeng merupakan kawasan yang potensial untuk pengembangan sentra tanaman hortikultura di wilayah Indonesia timur.

Bagian utara Kabupaten Bantaeng, terdapat dataran tinggi yang meliputi pegunungan Lompobattang. Sedangkan di bagian selatan membujur dari barat ke timur terdapat dataran rendah yang meliputi pesisir pantai dan persawahan.

Dilihat dari kondisi geografis dengan kondisi pegunungannya, sangat cocok apabila sebagian besar penduduk Kabupaten Bantaeng merupakan petani. Kentang adalah salah satu tanaman hortikultura yang paling menonjol. Data terakhir menunjukkan bahwa produksi kentang mencapai 4.847 ton (2006). Selain kentang, hortikultura lainnya adalah kool 1.642 ton, wortel 325 ton dan buah-buahan seperti pisang dan mangga. Kabupaten Bantaeng juga termasuk salah satu produsen Jagung terbesar keempat di Sulawesi Selatan, Dari Total produksi Sulawesi Selatan sebanyak 800.000 ton jagung per tahun, produksi jagung di Kab. Bantaeng mencapai 186.561 Ton dengan luas lahan sebesar 36.178 Ha.

Dari data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banteng, dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepadatan dan jumlah penduduk terendah dan sebagai wilayah yang terluas, sangat wajar apabila Kecamatan Uluere di identik sebagai daerah bercocok tanam, dan Kecamatan Bantaeng dengan wilayah terluas dan terpadat menjadi kecamatan administratif dari Kabupaten Bantaeng.

Tabel 6. Kependudukan Kabupaten Bantaeng

Kecamatan	Luas (km ²) Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rumah Tangga
Bissappu	33	32,310	984	8,291
Uluere	67	11,315	168	2,618
Sinoa	43	12,132	279	3,301
Bantaeng	29	37,989	1,317	9,194
Eremerasa	45	18,462	410	4,710
Tompobulu	77	22,903	297	6,086
Pajukukang	49	30,049	614	7,513
Gantarangkeke	53	17,123	323	4,416

Sumber : (BPS Kabupaten Bantaeng 2016).

5.2. Lembaga Penunjang Agribisnis Hortikultura di Desa Bonto Marannu

Desa Bonto Marannu terdapat beberapa kelembagaan baik formal maupun nonformal yang terkait dengan subsistem agribisnis lembaga penunjang agribisnis tanaman hortikultura. Lembaga formal yaitu lembaga Koperasi Unit Desa (KUD) dan lembaga BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan), sedangkan lembaga nonformal yaitu Kelompok Tani. Lembaga penunjang agribisnis tersebut memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan petani, sebagai penggerak, penghimpun, penyalur sarana produksi serta membantu masyarakat petani mengatasi permasalahan yang ada.

5.2.1. Lembaga Keuangan

5.2.1.1. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang terdiri dari beberapa orang yang menjalankan suatu tujuan bersama untuk kepentingan orang banyak dan melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tanggal 17 Mei 2000 secara resmi didirikan Koperasi Unit Desa Berkat Lestari yang terletak di Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. Koperasi tersebut didirikan pada tanggal 17 Mei Tahun 2000 dengan badan hukum No.268/BH/KDK.4/I/V/2000. Dalam melakukan aktivitasnya didalam suatu kehidupan organisasi koperasi akan mengalami perubahan-perubahan yang akan terjadi dari waktu ke waktu.

Badan usaha atau koperasi memiliki struktur organisasi yang menunjukkan adanya tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing bagian. Dalam menetapkan struktur organisasi suatu perusahaan disesuaikan dengan kondisi atau tipe dari garis wewenang yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan secara efektif dalam semua aktifitas harus ada pembagian tugas atau kerja kepada masing-masing individu. Alat kelengkapan atau perangkat organisasi koperasi ini terdiri dari : Rapat Anggota, pengurus, dan pengawas (Pasal 21 UU No. 25 Tahun 1992).

KUD (Koperasi Unit Desa) Berkat Lestari memiliki visi dan misi sebagai berikut :

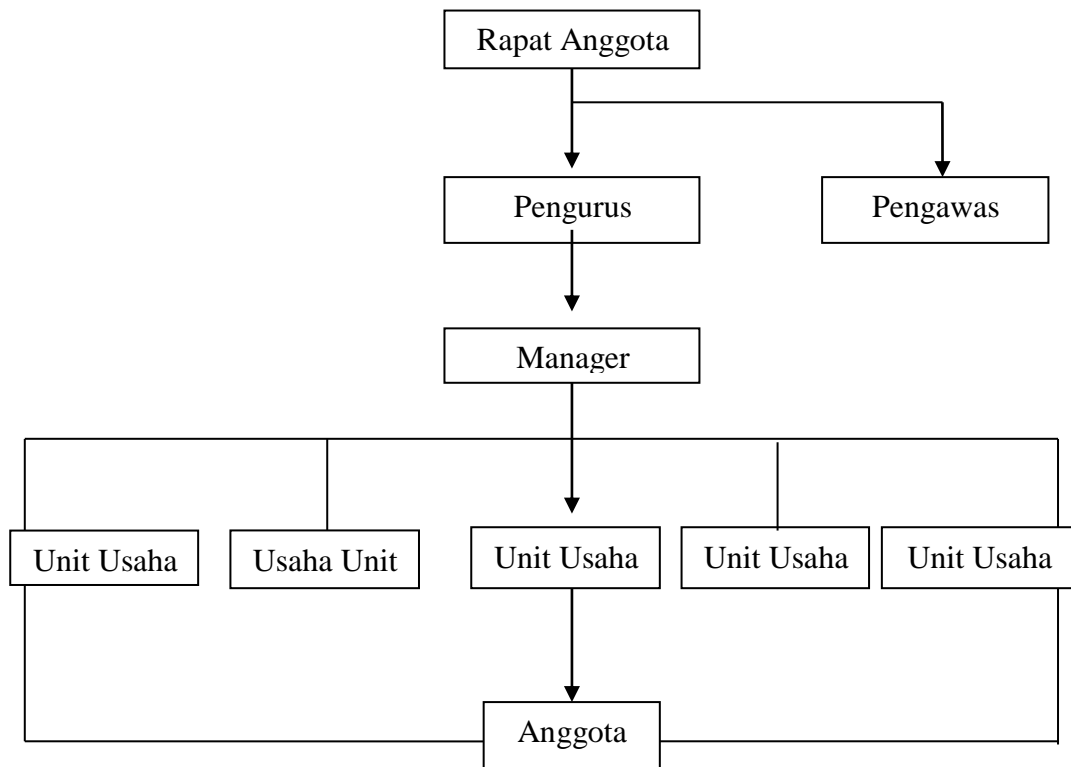
- Visi

“Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Sehat, Kuat, Tangguh dan Mandiri untuk Berkontribusi Dalam Perekonomian Nasional”

- Misi

- a. Meningkatkan akses Pembiayaan Formal bagi Koperasi dan UMKM.
- b. Meningkatkan akses dan sumber pembiayaan yang lebih luas, mudah dan terjangkau bagi koperasi dan UMKM.
- c. Menyiapkan bahan kebijakan yang kondusif bagi perkembangan Koperasi dan UMKM.
- d. Memantapkan koordinasi dengan para lintas pelaku dalam rangka meningkatkan sinergi pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Berikut struktur organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Berkat Lestari terdapat pada Gambar 3.



Sumber : Koperasi Unit Desa (KUD) Berkat Lestari (2016).

Gambar 3. Struktur organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Berkat Lestari

5.2.2. Lembaga Sumber Daya Manusia (SDM)

5.2.2.1. Lembaga Penyuluhan

Adanya pelayanan penyuluhan, masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, salah satunya pelayanan yang diberikan oleh Penyuluh Pertanian di BP3K (Balai Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng yang terjun langsung untuk memberikan penyuluhan dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dilapangan. Disamping itu hal ini akan menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan

pemerintah daerah menjalankan fungsinya sebagai abdi Negara maupun sebagai abdi masyarakat. Hal ini diperjelas dalam Undang-Undang No.16 Pasal 29 tentang peran serta dan kerja sama penyuluh adalah pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan.

BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan) memiliki visi dan misi sebagai berikut :

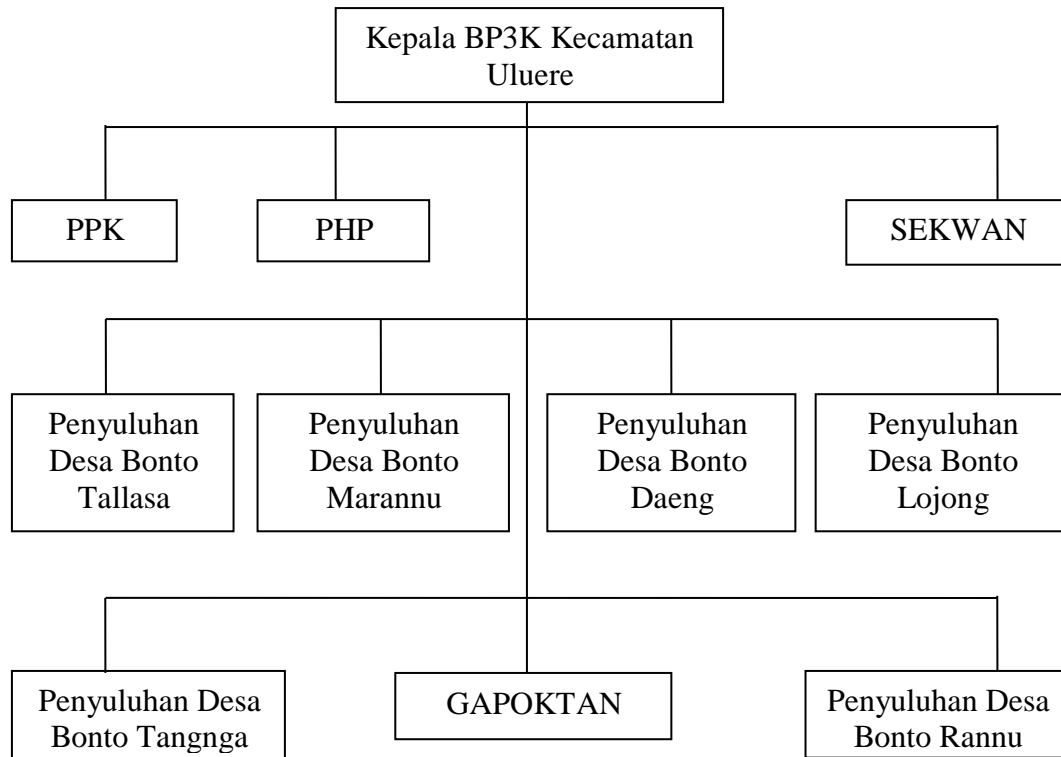
- Visi

Mewujudkan Penyuluhan yang Tangguh Berbasis Informasi dan Teknologi Menuju Kemandirian , Kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

- Misi

- a. Mengoptimalkan UPT Balai Penyuluhan Kecamatan dan PPD (Pos Penyuluhan Desa) sebagai pusat informasi dan teknologi.
- b. Meningkatkan SDM penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha
- c. Mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien.
- d. Mewujudkan kelembagaan dan usaha tani yang kuat , mandiri dan berdaya saing.

Struktur organisasi BP3K Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada Gambar 4.



Sumber : BP3K Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng 2016

Gambar 4. Struktur organisasi BP3K Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng

5.2.2.2. GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani)

Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya.

Pembentukan Gapoktan di Kecamatan Uluere dilakukan suatu musyawarah dan dihadiri oleh para petani dan ketua kelompok tani yang akan bergabung dalam organisasi gapoktan, yang sebelumnya disetiap masing-masing kelompok, telah

disepakati kepengurusan Gapoktan oleh para anggota kelompok yang bergabung kedalam Gapoktan. dalam pelaksanaan pembentukan Gapoktan sekaligus disepakati kepengurusan dalam jangka waktu kepengurusan, ketua gapoktan dipilih secara musyawarah oleh para anggota Gapoktan dan selanjutnya ketua untuk memilih pendamping dalam kepengurusannya. Gapoktan yang baik itu ada sekretaris dan bendahara, kepengurusan gapoktan dilakukan pengukuhan oleh pejabat Kecamatan.

Beda halnya dengan kelompok tani yang lebih dari satu kelompok dalam satu desa dan satu desa dan hanya sebagai tempat atau wadah untuk para petani, Gapoktan atau gabungan kelompok tani mempunyai arti luas yaitu gabungan dari semua kelompok tani di Kecamatan Uluere.

Gapoktan termasuk lembaga formal yang sengaja dibentuk untuk kalangan petani, seluruh kelembagaan dalam bentuk aturan main. Gapoktan meliputi aturan formal berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur secara internal dan eksternal selain itu Gapoktan mempunyai aturan formal yang berupa hasil kesepakatan dan musyawarah terkait dengan jadwal rapat internal dilakukan 2-3 kali pertemuan dalam 1 bulan dan sanksi dan aturan dalam gapoktan.

5.2.3. Lembaga Pemerintah

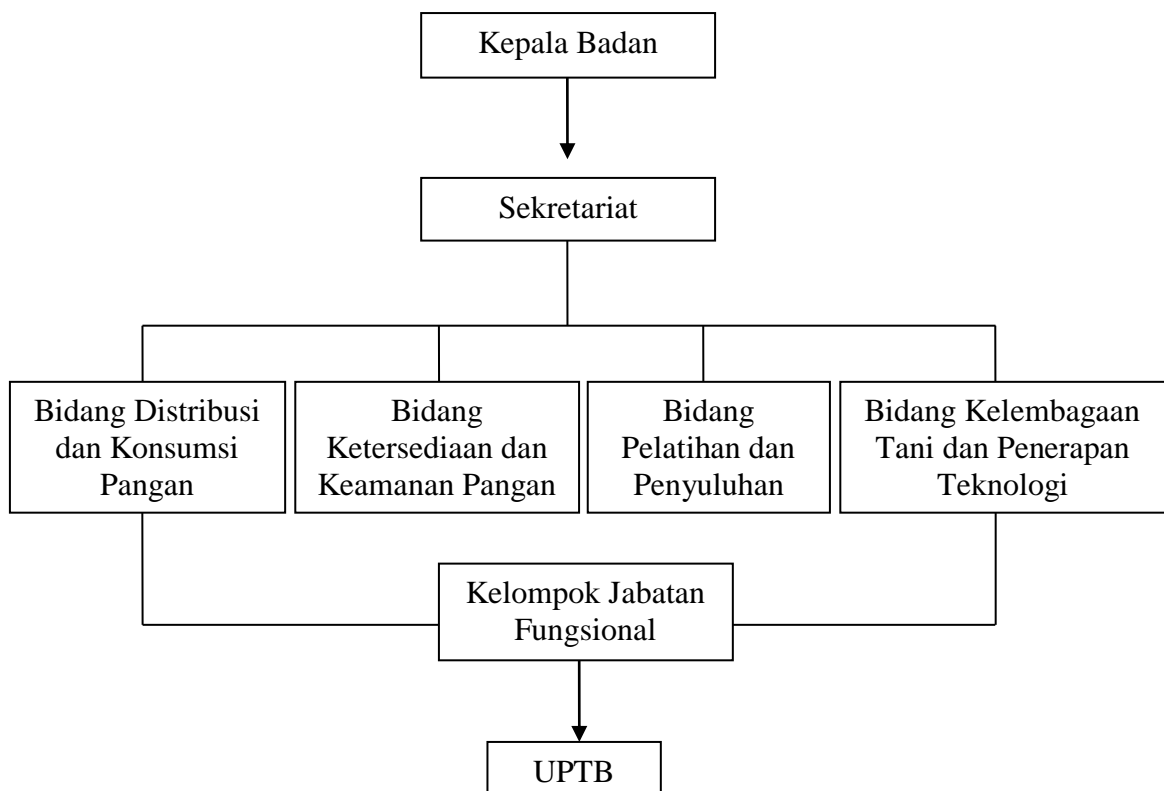
5.2.3.1. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantaeng merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bantaeng, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Bantaeng, 2015).

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur Pendukung Tugas Bupati dan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berikut struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan tersaji pada Gambar 5.



Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Bantaeng 2015.

Gambar 5. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

5.3. Peran dan Fungsi Lembaga Penunjang Agribisnis Hortikultura di Desa Bonto Marannu

5.3.1. Lembaga Keuangan

Pertumbuhan kredit pertanian di Indonesia masih jauh dibawah target dengan share kredit hanya 9,24% dari total kredit yang disalurkan perbankan secara nasional, padahal berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia menunjukkan bahwa risiko kredit di sektor pertanian sangat rendah. Kredit bermasalah (*non Performing Loan*) pada tahun 2016 hanya 2,23 persen. Sementara NPL untuk sektor usaha non-pertanian sebesar 3,58 persen. Dengan demikian, kualitas kredit di sektor pertanian tidak dapat dijadikan alasan untuk kurangnya dukungan lembaga keuangan kepada sektor tersebut (Badan Pusat Statistik, 2016).

Desa Bonto Marannu sendiri, petani sering membutuhkan pinjaman untuk mendukung kegiatan agribisnis hortikultura yang dijalankannya. Dari wawancara yang dilakukan, mereka membutuhkan akses pendanaan dalam bentuk :

- Modal Kerja

Modal kerja ini untuk membeli input (benih/bibit, pupuk, pestisida) terutama setiap dimulainya musim tanam.

- Pembiayaan Alat Pertanian

Pinjaman yang dimaksud oleh petani ini adalah pembiayaan atas alat seperti traktor dan kendaraan angkut. Kredit ini sifatnya tanpa pencairan dana kepada debitur melainkan dibayarkan kepada toko penjual alat pertanian yang

dibutuhkan yang bekerjasama dengan bank maupun lembaga pembiayaan tersebut.

Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan, terdapat satu Koperasi Unit Desa (KUD) yang beroperasi dan berlokasi di Desa Bonto Marannu. Menurut petani, mereka memiliki kecenderungan untuk tidak berpatok pada unit penyalur kredit yang berupa KUD karena batas maksimum yang dapat disalurkan dianggap rendah.

Minimnya dan bahkan tidak adanya kantor perwakilan perbankan maupun lembaga pembiayaan di desa tersebut, maka masyarakat pun perlu untuk ke Kota Bantaeng untuk dapat mengajukan pinjaman. Beberapa unit perbankan dan lembaga pembiayaan yang didata adalah :

- BRI KCP Unit Banyorang
- Mandiri Unit Mikro KCP Bantaeng
- Bank BNI Bantaeng
- Bank BPD Kantor Cabang Bantaeng
- Bank Danamon Cabang Bantaeng
- BPR Bhakri Riyadi
- BPR Shinta Bhakti

Selain unit perbankan di atas, terdapat pula lembaga kredit non-bank yang beroperasi di Kabupaten Bantaeng, yaitu :

- Adira Kredit Bantaeng
- Kredit Plus Bantaeng
- FIF Spektra

Unit perbankan dan lembaga pembiayaan tersebut berkantor di Kota Bantaeng dan mencakup pelayanan sampai ke desa, termasuk desa Bonto Marannu. Bahkan sering kali mereka turun menawarkan dan memasarkan kredit/pinjaman baik itu untuk pembiayaan modal kerja maupun kredit alat pertanian.

Adapun produk unggulan khusus yang dibuat untuk pertanian dari bank dan lembaga pembiayaan tersebut yang sesuai dengan karakteristik petani yaitu:

- Kredit Usaha Rakyat

Sejalan dengan amanat UU No. 20 untuk membantu mengatasi kurangnya akses UMKM untuk memperoleh kredit/pembiayaan, Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007. Dalam kurun waktu 2010 – 2014, realisasi penyaluran KUR rata-rata melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Target yang ditetapkan sebesar Rp. 20 T per tahun atau total Rp. 100 T dalam kurun waktu 5 tahun tersalurkan Rp. 178,45 T.

Namun demikian terdapat kelemahan dalam program Kredit Usaha Rakyat tersebut. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LK-BUN 2012 No.07/5/XV.2/04/2013 terdapat temuan bahwa penyaluran KUR dan pemberian subsidi IJP KUR kepada UMKMK belum dapat dinilai tepat sasaran. Hal ini diperkuat dengan temuan dari LIPI yang menyatakan bahwa program KUR memberi manfaat besar kepada perbankan dan perusahaan penjamin tetapi mengecilkan kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan. Rekomendasi BPK atas temuan ini adalah dengan membangun aplikasi terintegrasi antara pemerintah, perusahaan penjamin kredit dan bank pelaksana

yang antara lain digunakan untuk memantau ketepatan sasaran program. Sedangkan untuk mempercepat dan memperkuat pelaksanaan program KUR, Menteri Keuangan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM.

Saat ini rata rata perbankan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan limit maksimum Rp. 25.000.000,-

- Kredit Mikro

Dari hasil wawancara, Kredit Mikro dan KUR berbeda dari sisi limit yang diberikan. Kredit mikro adalah pinjaman dalam jumlah kecil untuk orang miskin dengan tujuan mereka bisa berwirausaha. Kredit mikro ditujukan untuk orang-orang yang tidak memiliki jaminan, pekerjaan tetap, dan riwayat kredit yang terpercaya, serta tidak mampu untuk memperoleh kredit biasa. Kredit mikro merupakan bagian dari keuangan mikro, suatu layanan keuangan untuk membantu orang-orang miskin.

- Kredit Traktor Quick

CV. Karya Hidup Sentosa(QUICK) memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan traktor QUICK dengan cara pembelian dengan sistem kredit. Saat ini CV. Karya Hidup Sentosa (QUICK) bekerjasama dengan divisi kredit dari PT. Federal Internasional Finance (FIF) yang dikenal sebagai penyedia layanan kredit untuk sepeda motor.

- Kredit Umum lainnya

Mengenai lambat atau sedikitnya penyaluran kredit disektor pertanian, melalui program Akselerasi, Sinergi dan Inklusi (AKSI) Pangan OJK, beberapa bank akan telah meningkatkan komitmen penyaluran kredit ke sektor pertanian

yaitu 14,12% lebih besar tahun lalu. Diharapkan dari percepatan ini, petani dapat memperoleh kemudahan untuk mengakses pembiayaan pertanian.

5.3.2. SDM (Lembaga Sumber Daya Mausia)

5.3.2.1. Kelompok Tani sebagai Media Tukar Fikiran dan Ide

Di desa Bonto Marannu, terdapat beberapa Kelompok Tani non Gapoktan dan Kelompok Wanita Tani (KWT). Kelompok ini dibentuk oleh pemerintah selain sebagai wadah bisnis tetapi juga sebagai wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya dapat meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupannya yang lebih sejahtera.

Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang berhasil didata tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 8. Kelompok Tani dan KWT di Desa Bonto Marannu

Nama Poktan	Nomor Registrasi	Nama Ketua	Jumlah Anggota
KWT. Mawar	730301110-0-55300	St. Amar	100
Baji Minasa	730301110-0-67057	Nurming	25
Abulo Sibatang	730301110-0-67060	Abd Azis	25
Sipakainga	730301110-0-67062	Dg. Maseng	25
Sipakatau	730301110-0-67065	Misi	25
Julu Atia	730301110-0-67071	Dedi	25
Sipassiriki	730301110-0-67073	Dg. Saha	25
Samaturu	730301110-0-67081	Syamsul B	25
Gapoktan Loka	730301110-0-67088	Jabbar	75
WT Mawar	730301110-0-67092	St Amar	20
WT Puspita Nusantara	730301110-0-67099	Fitriyani	20
WT Anggrek	730301110-0-67105	Nuraeni	20
WT Edelwis	730301110-0-67110	Ika Nurlaelah	20

Sumber : Data Desa Bonto Marannu 2016.

Kelompok Tani dan KWT ini merupakan wadah yang paling memungkinkan untuk pengembangan kemampuan tani bagi masyarakat desa mengingat fasilitas belajar di desa yang masih minim.

Kebanyakan program pengembangan kapasitas petani yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten akan dilakukan melalui Kelompok Tani dan KWT ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatk efesiensi dan efektifitas pelatihan/ training. Selain karena telah memiliki data base keanggotaan, sudah ada beberapa Kelompok Tani dan KWT yang telah mengelola alat-alat training yang dibutuhkan selama pelatihan.

5.3.2.2 Unit Kerja Pemerintah

Dari hasil wawancara dengan petani lokal, unit kerja pemerintah yang secara rutin memberikan pelatihan, penyuluhan dan pengembangan manusia adalah sebagai berikut :

- Badan Penyuluh Pertanian, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bantaeng
- Bina Usaha Tani

5.3.2.3 Pengembangan SDM Non-Formal

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menunjang agribisnis hortikultura tidak hanya didapatkan secara formal yang dilaksanakan oleh badan atau organisasi, oleh petani, beberapa metode non-formal justru akan memberikan nilai tersendiri dan dianggap lebih tepat sasaran. Metode tersebut seperti :

- Kunjungan Lapangan oleh wiraniaga benih, pupuk, pestisida

Kunjungan ini tentunya dilakukan oleh perusahaan benih, pupuk, pestisida, dan saprodi tentunya untuk memaksimalkan bisnis yang mereka jalankan, memastikan penjualan dan sekaligus melakukan monitoring atas kualitas barang jualan di petani. Tetapi dari sinilah kebanyakan petani akan lebih mengembangkan kapasitas dan pengetahuan mereka dengan diskusi lapangan. Wiraniaga yang dimaksud akan memberikan masukan secara inter-personal berdasarkan pengamatan dari lokasi lain dan pengalaman.

- Promosi oleh Toko Tani

Untuk memaksimalkan barang jualan, toko tani lokal juga akan memberikan masukan kepada petani mengenai produk-produk unggulan mereka yang akhirnya menambah wawasan petani.

- Media Massa (Radio & TV)

Dari pengamatan peneliti selama didaerah penelitian, petani lokal masih mendengarkan Radio sebagai hiburan. Dan salah satu acara radio yang cukup rutin untuk didengarkan adalah perbincangan dalam “Siaran Pedesaan RRI”

5.3.3 Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pengambilan suatu kebijakan baik melalui pemerintah setempat yang terkait maupun bawahannya dalam pelaksanaan kegiatan melalui pertemuan dan penyuluhan pertanian.

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur Pendukung tugas Bupati dan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Bantaeng, 2015).

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Selain dari beberapa manfaat Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di atas juga di Desa Bonto Marannu berperan dan berfungsi untuk memberikan suatu keputusan dalam pengambilan suatu kebijakan untuk segala

kegiatan pertanian yang akan dilakukan seperti pertemuan atau pembinaan para petani yang dipandu oleh lembaga pemerintah.

VI. KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

1. Kelembagaan merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Kelembagaan khususnya di bidang pertanian, sangat lekat dengan sistem agribisnis. Kelembagaan pertanian dan petani khususnya subsistem produksi di Desa Bonto Marannu memiliki lembaga formal dan nonformal. Lembaga formal yaitu: KUD (Koperasi Unit Desa), BP3K (Balai Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan), dan juga Gapoktan sedangkan lembaga nonformal yaitu kelompok tani.
2. Masing-masing lembaga penunjang memiliki peran dan fungsi memberikan informasi mengenai perkembangan teknologi pertanian, memberikan penerapan cara bercocok tanam yang baik, dapat meringankan biaya dan memberikan tambahan permodalan dalam usahatani, menyediakan sarana input maupun output, dan membina petani dalam aspek pembudidayaan.

6.2. Saran

Saran yang direkomendasikan untuk penyempurnaan lembaga penunjang terhadap agribisnis tanaman hortikultura yang ada di Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng yaitu :

1. Memberikan pelatihan-pelatihan atau penyuluhan bagi petani untuk lebih fokus terhadap pertanian dan lebih bersosialisasi di lapangan sehingga dapat menambah keterampilan maupun pengetahuan dan meningkatkan perekonomian.
2. Meningkatkan sosialisasi/ penyuluhan untuk terciptanya kerja sama antar sesama petani dan lembaga penunjang yang ada baik itu lembaga formal maupun nonformal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin dan Said Zainal, 2008, *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik*. Suara Bebas. Jakarta.
- Anantanyu Sapta. 2010. *Kelembagaan Petani : Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya*. Jurnal. Fakultas Pertanian: UNS (Universitas Sebelas Maret).
- Djogo, dkk. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri*. KRAF. Bogor.
- Dimiyati, A. 2007. *Pembinaan Petani dan Kelembagaan Petani*. Balitjeruk Online. Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Tlekung-Batu. Jawa Timur. Diakses 20 Maret 2017.
- Departemen Pertanian. 2007. *Tanaman Hortikultura*. www.deptan.go.id. Diakses 22 September 2017.
- Gumbira et al. 2005. *Prospek dan Tantangan Agribisnis Indonesia*. *Economic Review Journal* 200. <http://209.85.135.104/search?q=cache:3EDCELftAoJ:www.bni.co.id/Document/16%2520Aqribisnis.pdf+Economic+Review+Jurnal,+Gumbira&h=id&ct=clnk&cd=1&ql=id>. Diakses pada 16 Mei 20017.
- Hendropuspito, C. D. 1989. *Sosiologi Sistematis*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Hermanto, 2007. *Rancangan Kelembagaan Tani dalam Implementasi Prima Tani di Sumatera Selatan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Diakses 20 Maret 2017.
- Hasanah Rika. 2015. *Ekologi Pemerintah*. 2015.. https://www.academia.edu/11202264/ekologi_pemerintahan. Diakses 28 September 2017.
- Karim Adiwarmanto, 2002. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. IIT Indonesia. Jakarta.
- Hasibuan Malayu SP, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Mc. Noughton, S.J., Larry L. Wolf. 1990. *Ekologi Umum*. Gajah Mada University.. Yogyakarta.
- Pambudy R. T, dkk. 2001. *Bisnis dan Kewirausahaan dalam Sistem Agribisnis*. Pustaka Wirausaha Muda. Bogor. Diakses 21 Maret 2017.

- Saragih B, 1995. *Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Menghadapi Abad-21*. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Ekonomi Sumberdaya, Fakultas Pertanian. IPB (Institut Pertanian Bogor) 21 Desember 1995.
- Saharuddin, 2001. *Nilai kultur inti dan institusi lokal dalam konteks masyarakat multi etnis*. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Depok .
- Wahyuningsih Sri. 2004. *Pengembangan Agribisnis Ditinjau Dari Kelembagaan* <https://www.google.com/search?q=subsistem+lembaga+hulu+BUMN&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses 16 Agustus 2107.
- Syahyuti. 2007. *Kebijakan Pembangunan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan Bogor*. Pusat Analisis Social Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian. 5 (1): 15-25. https://www.google.co.id/search?rlz=1C1CHBF_enID742ID743&q=Pusat+Analisis+Social+Ekonomi+dan+Kebijakan+Pertanian.+Analisis+Kebijakan+Pertanian&oq=Pusat+Analisis+Social+Ekonomi+dan+Kebijakan+Pertanian.+Analisis+Kebijakan+Pertanian&gs_l=psy-ab.3...1790.1790.0.3421.1.1.0.0.0.180.180.0j1.1.0.dummy_maps_web_fallback...0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.ah2mUNVRC1g Diakses 07 Maret 2017.
- Yusdja et al. 2002. *Prinsip Koperasi*, Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

1. Kuesioner KUD (Koperasi unit Desa)

Identitas Responden

- a. Nama Responden :.....
- b. Umur Responden :.....
- c. Jabatan Responden :.....
- d. Jenis kelamin P/L :.....
- e. Pendidikan Terakhir :.....

Karakteristik umum kelembagaan

- a. Bagaimana keadaan pertanian di Bonto Marannu ?
- b. Tanaman pertanian yang paling berpotensi di Bonto Marannu ?
- c. Jenis tanaman hortikultura yang paling berpotensi di Bonto Marannu ?
- d. Bagaimana potensi agribisnis untuk komoditas hortikultura yang ada ?
- e. Lembaga penunjang apa saja yang ada untuk petani agribisnis hortikultura ?
- f. Bagaimana sejarah lembaga ?
- g. Bagaimana perkembangan lembaga sampai saat ini ?
- h. Bagaimana struktur organisasi lembaga ?
- i. Apa tujuan berdirinya lembaga ?
- j. Bagaimana sistem kerja lembaga untuk petani agribisnis hortikultura ?
- k. Bagaimana pengadaan sarana sarana dan prasarana mulai dari produksi sampai pemasaran untuk petani hortikultura ?

Lampiran 2. Peta Lokasi Peneitian



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian



Gambar 2. Dataran Tinggi Kabupaten Bantaeng

Lampiran 3. Peran dan Fungsi Lembaga Penunjang Agribisnis Hortikultura di Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng.

No.	Lembaga Penunjang	Peran	Fungsi
1.	Lembaga Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> Berperan penting dalam memberikan modal input (benih/bibit, pupuk, pestisida) terutama setiap dimulainya musim tanam. Memberikan pinjaman untuk pembiayaan alat pertanian 	Berfungsi menyediakan modal termasuk investasi dan modal kerja.
2.	Lembaga SDM (Sumber Manusia)	<ol style="list-style-type: none"> Berperan sebagai wadah bisnis tetapi juga sebagai wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya dapat meningkat, dan pendapatannya juga bertambah. Melaksanakan program pengembangan kapasitas petani yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. 	Berfungsi sebagai penambah lembaga pendidikan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
3.	Lembaga Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> Berperan dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan. Terutama dalam memberikan pelatihan, penyuluhan dan pengembangan 	Berfungsi sebagai pembuat peraturan dan perundang-undangan, pemerintah bersama lembaga legislatif membuat undang-undang yang akan

		<p>manusia.</p> <p>2. Mengembangkan SDM (Sumber Daya Manusia) secara nonformal seperti kunjungan lapangan dari berbagai daerah, pengenalan produk terbaru dari berbagai took pertanian dan pemberian informs melalui radio/ televise.</p>	<p>mengatur, mengkoordinir dan mengawasi semua interaksi pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatannya</p>
--	--	---	---

Lampiran 4. Dokumentasi Lapangan



Gambar 3. Kantor UPTD Desa Bonto Marannu



Gambar 4. Kantor Dinas Pertanian Kecamatan Uluere



Gambar 5. Rumah Ketua Kelompok Tani



Gambar 6. Koperasi Unit Usaha Kabupaten Bantaeng



Gambar 7. KWT Olivia Merah Desa Bonto Marannu



Gambar 8. Dokumentasi Pengambilan Data Kantor Desa Bonto Marannu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 03 April 1994 dari ayah Dasri dan ibu Dahlia. Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara.

Pendidikan formal yang dilalui penulis adalah SD Inpres Tamarunang lulus pada tahun 2007, SMP Negeri 2 Bissappu lulus pada tahun 2010, SMA Negeri 2 Bantaeng lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis lulus seleksi masuk Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selain mengikuti perkuliahan penulis juga aktif organisasi internal kampus yakni menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Agribisnis periode 2014-2015, dan menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2016-2017.

Tugas akhir dalam pendidikan tinggi diselesaikan dengan menulis skripsi yang berjudul “ Peran dan Fungsi Lembaga Penunjang terhadap Agribisnis Tanaman Hortikultura di Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng ”.